

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah penting bagi semua negara yang ada di dunia, khususnya di Indonesia yang masih merupakan Negara Sedang Berkembang (NSB). Sejak negara ini merdeka, kemiskinan menjadi masalah yang serius di Indonesia. Masalah kemiskinan yang begitu kompleks berkaitan dengan banyak aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan aspek yang lainnya. Kemiskinan yang terjadi di dalam suatu negara harus diperhatikan sebagai masalah yang serius, karena kemiskinan membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan standar hidup di suatu wilayah tertentu.

Pembangunan nasional harus mampu meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk. Pembangunan nasional harus mampu mengangkat kehidupan manusia yang berada pada tingkatan paling bawah (penduduk miskin) ke tingkat yang lebih baik dari waktu ke waktu. Hal ini penting sebab semakin besar jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah akan menjadi tinggi beban pembangunan. Suatu pembangunan dikatakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin dapat diminimalkan.

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup, dan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh sebagian besar negara sedang berkembang serta merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh Negara-negara lain, seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia.

Seperti halnya kondisi kemiskinan di Indonesia, jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia walaupun sedikit berfluktuasi namun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut cenderung mengalami penurunan, namun jumlah dan persentase tersebut masih relatif tinggi, terutama jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yang mempunyai jumlah dan persentase penduduk miskin yang relatif kecil.

Untuk lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Indonesia, data BPS pada bulan Maret tahun 2015 memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu 28.59 juta jiwa, sementara pada tahun 2017 Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin terendah dari tahun sebelumnya sebesar 27.77 juta jiwa. Jadi tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan tiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini

**Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Lima Tahun Terakhir (2013 – 2017)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah penduduk miskin (orang)</b>
2013	28.066.600
2014	28.280.010
2015	28.592.790
2016	28.005.390
2017	27.771.220

**Sumber :** Badan Pusat Statistik.

Dari tabel 1.1, kemiskinan Indonesia cenderung mengalami fluktuasi. Di tahun 2015 kemiskinan sebesar 28.59 juta orang, sedangkan di tahun 2016 kemiskinan Indonesia turun menjadi 28.00 juta orang.

Menurut Suhariyanto dalam berita Kompas mengatakan bahwa: “Sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dari September 2017 hingga Maret 2018 adalah inflasi umum dalam periode itu sebesar 1,92 persen serta rata-rata pengeluaran perkapita tiap bulan untuk rumah tangga di 40 persen di lapisan bawah yang tumbuh 3,60 persen”<sup>1</sup>.

Walaupun jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun, namun berdasarkan angka absolutnya masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan apabila terjadi guncangan perekonomian maka bukan tidak mungkin hal itu akan sangat mudah menggeser penduduk yang tadinya berada di atas garis kemiskinan akan jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.

Menurut The World Bank dalam Sihotang, J. Ada tiga ciri menonjol dari kemiskinan di Indonesia, yaitu :

---

<sup>1</sup>Suhariyanto, Persentase Kemiskinan Indonesia,  
<https://money.kompas.com/read/2016/07/18/143000926/Ini.Penyebab.Penduduk.Miskin.Maret.2016.Turun.500.000.Orang>.

- (1) banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan,**
- (2) ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia, dan**
- (3) mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, sehingga perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.<sup>2</sup>**

Berbagai kajian dan program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah, walaupun sudah membuahkan hasil namun belumlah optimal sehingga kajian untuk menemukan berbagai solusi untuk meminimalkan jumlah penduduk miskin tetap relevan untuk dilakukan. Pertanyaannya adalah dari mana harus dimulai, sebab kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks bersifat multidimensi dan sebenarnya tidak mudah dilihat dari suatu angka absolut semata.

Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang erat, pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan tolak ukur kinerja perekonomian suatu wilayah, akan tetapi belum pasti tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingginya tingkat kesejahteraan rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Boedino dalam Seri Jefri Adil Waruwu menjelaskan bahwa :

**Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu: sisi totalnya (GDP) dan jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk dilain pihak. Jadi proses kenaikan output perkapita, tidak bisa tidak, harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan yang lengkap haruslah bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan sejumlah penduduk. Dengan kata lain, teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP total,**

---

<sup>2</sup>Sihotang, J. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatra Utara, Lembaga Penelitian, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2015. hal. 4&5.

dan teori mengenai pertumbuhan penduduk<sup>3</sup>.

**Tabel 1.2. Persentase Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Lima Tahun Terakhir (2013 – 2017)**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
2013	5.73
2014	5.01
2015	4.88
2016	5.03
2017	5.07

**Sumber** : Badan Pusat Statistik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sebesar 4,79 persen merupakan yang terendah enam tahun terakhir.

Menurut Direktur Eksekutif Institute For Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati dalam berita Kompas menjelaskan bahwa :

**Perlambatan ekonomi sebenarnya tidak di alami di Indonesia. Lesunya perekonomian global pada tahun terakhir membuat pertumbuhan ekonomi banyak negara melambat. Penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 adalah anjloknya konsumsi rumah tangga sepanjang 2015, konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh sebesar 4,96 persen angka tersebut lebih rendah di banding dua tahun sebelumnya yang mencapai 5,43 persen di tahun 2013 dan 5,16 persen di tahun 2014.**<sup>4</sup>

Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi seiring mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

---

<sup>3</sup>Seri Jefri Adil Waruwu, **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014**, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2016, hal.4 (skripsi diterbitkan)

<sup>4</sup>Enny Sri Hartati, Pertumbuhan Ekonomi  
<https://money.kompas.com/read/2016/02/07/182803.626/Pertumbuhan.Ekonomi.Terendah.dalam.Enam.Tahun.Terakhir.2015.?page=all>

Menurut Samuelson & Nordhaus efek dari pengangguran adalah :

**Pengangguran merupakan masalah ekonomi karna hal tersebut menyia-nyiakan sumberdaya yang berharga. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang<sup>5</sup>.**

**Tabel 1.3. Persentase Pengangguran Terbuka di Indonesia Lima Tahun Terakhir (2013 – 2017)**

<b>Tahun</b>	<b>Pengangguran Terbuka (%)</b>
2013	6.17
2014	5.94
2015	6.18
2016	5.61
2017	5.50

**Sumber** : Badan Pusat Statistik.

Dalam limatahun terakhir, pengangguran Indonesia cenderung mengalami fluktuasi. Di tahun 2015 pengangguran sebesar 6.18 %, sedangkan di tahun 2017 pengangguran Indonesia turun menjadi 5.50 %.

Kepala BPS Suhariyanto dalam berita Kompas menjelaskan bahwa:

**Penurunan angka pengangguran di Indonesia dalam waktu setahun ini karna adanya perbaikan ekonomi, dengan adanya perbaikan ekonomi, maka permintaan industri terhadap sumberdaya atau angka kerja produktif mengalami peningkatan. Kenaikan jumlah tenaga kerja terutama di sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 1,01 juta orang (3,93 persen) dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebanyak 500.000 orang (9,98 persen). Suhariyanto menambahkan, ketika penyerapan tenaga kerja di sektor primer seperti pertanian, manufaktur atau industri dan konstruksi merosot, sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan lain menjadi menopang dalam menyerap tenaga kerja.<sup>6</sup>**

Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah menggunakannya

---

<sup>5</sup>Paul, A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Ilmu Makroekonomi*, Edisi tuju belas. PT. Media Global Edukasi. 2004. hal. 363

<sup>6</sup>Suhariyanto, Pengangguran turun, <https://money.kompas.com/read/2016/11/07/162203926/angka.pengangguran.turun.jadi.7.03.juta.orang>.

untuk mengelola perekonomian negara. Pengeluaran pemerintah atau disebut belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.

Sukirno berpendapat bahwa :

**Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor, salah satunya adalah jumlah pajak yang diterima, pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian untuk membiayai berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi suatu Negara.<sup>7</sup>**

**Tabel 1.4. Jumlah Belanja Pemerintah di Indonesia Lima Tahun Terakhir (2013 – 2017)**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Pemerintah (Milyar Rupiah)</b>
2013	1.137.162.900
2014	1.203.577.200
2015	1.183.303.700
2016	1.154.018.200
2017	1.265.359.400

**Sumber :** Badan Pusat Statistik

Dalam limatahun terakhir, belanja pemerintah Indonesia cenderung mengalami penurunan dan kenaikan. Di tahun 2013 belanja pemerintah sebesar 1.137.162.900 milyar, sedangkan di tahun 2017 belanja pemerintah Indonesia naik menjadi 1.265.359.400 milyar.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen untuk mengatasi kemiskinan yang ada dinegara kita.

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu : investasi pada *financial assets* dan investasi pada *real assets*. Investasi pada

---

<sup>7</sup>Sadono, Sukirno. **Makroekonomi Teori Pengantar**, Edisi Ketiga, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Tahun 2012, hal. 168

*financial assets* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real assets* diwujudkan dalam bentuk pembelian *assets* produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya.

**Tabel 1.5. Laju Investasi di Indonesia Lima Tahun Terakhir (2013 – 2017)**

Tahun	Investasi (Milyar Rupiah)		Total
	PMA	PMDN	
2013	348.812.613	128.150.000	476.962.613
2014	354.900.760	156.126.000	511.026.760
2015	403.848.625	179.465.000	583.313.625
2016	389.160.304	216.230.000	605.390.304
2017	436.773.972	262.351.000	699.124.972

**Sumber :** Badan Pusat Statistik.

Dalam data investasi limatahun terakhir, Indonesia cenderung mengalami fluktuasi terhadap PMA dan PMDN. Di tahun 2014 PMA sebesar Rp.354.900.760 milyar, sedangkan di tahun 2017 PMA naik menjadi sebesar Rp.436.773.972 milyar. Dan begitu juga terhadap PMDN, di tahun 2014 jumlah PMDN sebesar Rp.156.126.000 milyar. Dan tahun 2017 PMDN mengalami kenaikan hingga Rp.262.351.000 milyar.

Investasi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran oleh sektor produsen untuk pembelian barang. Investasi yang terjadi di suatu Negara terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah dapat dijalankan melalui salah satu instrument kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah untuk investasi sedangkan investasi swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Dengan adanya investasi lowongan pekerjaan terbuka, sehingga kemiskinan akan berkurang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan**

## **Investasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2000-2018”.**

### **1.2. RumusanMasalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas masalah penelitian di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap jumlahpenduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.
2. Bagaimanakah pengaruh pengangguran terhadap jumlahpenduduk miskindi Indonesia tahun 2000-2018.
3. Bagaimanakah pengaruh belanja pemerintah terhadap jumlahpenduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.
4. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap jumlahpenduduk miskindi Indonesia tahun 2000-2018.

### **1.3. TujuanPenelitian**

Penelitian ini disertai dengan tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhanekonomi terhadap jumlahpenduduk miskin di Indonesia tahun2000-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap jumlahpenduduk miskin di Indonesia tahun2000-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah terhadap jumlahpenduduk miskindi Indonesia tahun2000-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap jumlahpenduduk miskindi Indonesia tahun2000-2018.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teori, minimal menguji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran belanja pemerintah, dan investasi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis, secara praktis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan ekonomi makro. Pemerintah mendapatkan informasi yang memadai dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.
  - b. Bagi penduduk miskin, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan untuk keluar dari masalah kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan hidup mereka, terutama jika kemiskinan itu bersumber dari diri mereka sendiri.
  - c. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah.
  - d. Bagi Fakultas, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan perbandingan bagi pembaca.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kemiskinan**

### 2.1.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan juga seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi.

Menurut Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing dan Dame Ester menjelaskan bahwa “masalah kemiskinan bukanlah hal baru, karena telah timbul sejak lama dan keadaan miskin itu merupakan sesuatu masalah yang akan selalu ada dan terus ada dalam berbagai negara termasuk di Indonesia”<sup>8</sup>.

Berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, tetapi statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu rantai dalam lingkaran kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan akan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan pekerjaan perumahan, air bersih pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Dengan kata lain, kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kemiskinan absolut, dimana pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis

---

<sup>8</sup>Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing dan Dame Ester, **Ekonomi Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2012, hal. 74.

kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

### **2.1.2. Ukuran Kemiskinan**

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu :

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya,
2. Jumlah kebutuhan yang lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu golongan miskin. Sedangkan yang kedua sifatnya lebih subyektif.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

### **2.1.3. Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang- kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan jenis komoditi di perdesaan. Rumus perhitungan garis kemiskinan (BPS) adalah :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Keterangan : GK = Garis Kemiskinan,

GKM = Garis Kemiskinan Makanan,

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan.

BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan batas garis kemiskinan setara dengan 2.100 kalori perkapita per hari yang akan disetarakan dengan rupiah. Selanjutnya, 2.100 kilokalori per kapita perhari akan disetarakan dengan rupiah ketika pengukuran kemiskinan dilakukan di tiap daerah/propinsi dengan menyesuaikan harga yang berlaku pada suatu daerah/propinsi tertentu. Pengukuran kemiskinan pada daerah/propinsi akan menggunakan satuan rupiah dengan menyesuaikan harga pada tiap-tiap daerah tertentu. Misalnya garis kemiskinan di Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 sebesar Rp 459,560,00 berbeda dengan garis kemiskinan di Propinsi D.I. Yogyakarta sebesar 333,561.

#### **2.1.4. Teknik Perhitungan GKM (Garis Kemiskinan Makanan)**

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*refence population*) yaitu 20

persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan(GKNM).

- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari.

Rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan adalah :

- Keterangan :  $GKM_j$  = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori),  $P_{jk}$  = Harga komoditi k di daerah j,  $Q_{jk}$  = rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j,  $V_{jk}$  = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j, j = daerah (perkotaan atau perdesaan). Selanjutnya  $GKM_j$  tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK_j} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

- Keterangan : kalori dari komoditi k di daerah j,  $HK_j$  = harga rata-rata kalori di daerahj.

$$F_j = \overline{HK_j} \times 2100$$

- Keterangan :  $F_j$  = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari.

### 2.1.5. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) dengan rumus perhitungan :

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right] a$$

- Keterangan :  $\alpha = 0$ ,  $z$  =garis kemiskinan,  $y_i$  = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1,2,3,\dots,q$ ),  $y_i < z$ ,  $q$  = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan,  $n$  =jumlah penduduk.

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

#### a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup layak.

Menurut Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing dan Dame Ester menjelaskan bahwa “Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup”<sup>9</sup>.

Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dikatakan

---

<sup>9</sup>.Ibid, hal . 75

miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

### b. Kemiskinan Relatif

**Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan (*poverty line*) yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ini disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan<sup>10</sup>.**

Ada beberapa tolak ukur yang dikembangkan untuk mengukur kemiskinan masyarakat yakni,

- 1) setara dengan beras,
- 2) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM),
- 3) Ukuran kemiskinan relatif,
- 4) Badan Pusat Statistik tolak ukur dari Bank Dunia.

**Tabel 2.1** : Batas Kemiskinan Kota dan Desa (Kg) di Indonesia.

<b>Batas Kemiskinan</b>	<b>Kota (kg)</b>	<b>Desa (kg)</b>
Miskin	480 – 600	320 – 480
Sangat Miskin	360 – 480	240 – 360
Melarat	270 – 390	180 – 300

**Sumber** : Badan Pusat Statistik.

---

<sup>10</sup>Loc Cit.

Standar internasional yang biasa dipakai Bank Dunia adalah pendapatan kurang dari dua dollar AS per hari, tetapi ada juga yang memakai satu dollar perhari.

## **2.2. PertumbuhanEkonomi**

### **2.2.1. Definisi PertumbuhanEkonomi**

Suatu perekonomian dikatakan bertumbuh adalah apabila jumlah produksi barang dan jasa dalam perekonomian tersebut mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Produksi total barang dan jasa selama satu tahun tertentu disebut namanya output nasional atau pendapatan nasional atau disebut dengan istilah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan output nasional atau pendapatan nasional suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan PDB riil satu tahun yang sedang berjalan dengan PDB riil satu tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persen. Demikian juga secara regional, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB riil satu tahun berjalan dengan PDRB riil satu tahun sebelumnya dinyatakan dalam persen.

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-

faktor apa saja yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.

Menurut Karl E. Case & Ray C. Fair Mengatakan bahwa :

**Pertumbuhan ekonomi terjadi bila (1) masyarakat mendapatkan lebih banyak sumberdaya, atau (2) masyarakat menemukan cara penggunaan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien. Agar pertumbuhan ekonomi menaikkan setandar hidup, tingkat pertumbuhan harus lebih tingkat kenaikan penduduk. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai *kenaikan GDP riil per kapita*.<sup>11</sup>**

### 2.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan teori pembangunan sejak pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith dan mengalami puncak kejayaannya dengan lahirnya teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh para ahli.

#### a. Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antarpelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith adanya memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) merupakan titik sentral pembahasan bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor pendorong yaitu :

1) Peningkatan keterampilan kerja,

---

<sup>11</sup>Karl E. Case, & Ray C. Fair. **Prinsip-prinsip Ekonomi Makro**, Edisi ke-5, Jakarta. PT INDEKS, Kelompok Gramedia 2004. hal. 325

2) Penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga.

Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju kesistemperekonomian modern yang kapitalistik. Meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat, mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi melakukan semua pekerjaan secara mandiri, namun lebih ditekankan pada spesialisasi untuk menggeluguti bidang tertentu.

#### **b. Teori Pembangunan Karl Marx**

Karl Marx dalam bukunya “Das Kapital” membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dari feodalisme, kapitalisme, dan kemudian yang terakhir adalah sosialisme. Evolusi perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi dimana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam tahap ini tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki tawar menawar tertinggi relatif terhadap pelaku ekonomi lain. Perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya pergeseran disektor ekonomi, dimana masyarakat yang semula agraris-feudalkemudian mulai beralih menjadi masyarakat industri yang kapitalis.

Seperti halnya masa feodal, pada masa kapitalisme ini para pengusaha merupakan pihak yang memiliki tingkat posisi tawar menawar tertinggi relatif terhadap pihak lain khususnya kaum buruh. Marx menyesuaikan asumsinya terhadap cara pandang ekonom klasik ketika itu dengan memandang buruh tidak memiliki posisi tawar menawar sama sekali terhadap para majikannya, yang merupakan kaum kapitalis. Konsekuensi logis penggunaan asumsi dasar tersebut adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan para pengusaha terhadap buruh.

#### **2.2.3. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi**

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu :

**a. Produk Domestik Bruto(PDB)**

Produk domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu perekonomian dalam satu tahun yang dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

**b. Produk Domestik Bruto per Kapita/Pendapatan perKapita**

Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Produk Regional Bruto (PDRB) per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih cepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara dari pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional maupun PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

**2.3. Pengangguran**

**2.3.1. Definisi Pengangguran**

Pengangguran sering digunakan sebagai istilah untuk menyatakan orang yang tidak bekerja sama sekali. Pengertian ini adalah kurang tepat sebab tidak semua orang tidak bekerja disebut sebagai penganggur. Beberapa kelompok masyarakat seperti para ibu rumah tangga dengan alasan harus mengasuh anak dan mengurus keluarga, anak-anak muda yang harus

sekolah atau kuliah dahulu, dan anak-anak orang kaya yang sudah memiliki kekayaan yang lebih dari cukup atau kemungkinan gajinya lebih kecil dari yang diharapkan biasanya tidak mau atau tidak sedang mencari pekerjaan. Oleh karena itu, kendatipun mereka tidak bekerja namun tidak disebut sebagai penganggur.

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi seiring mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran terbuka terdiri dari :

- a) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.**
- b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha**
- c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.**
- d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.<sup>12</sup>**

Setidaknya ada dua dasar utama klasifikasi pengangguran, yaitu pendekatan angkatan kerja (*labour force approach*) dan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*labour utilization approach*). Pendekatan angkatan kerja mendefinisikan pengangguran sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja membedakan angkatan kerja menjadi tiga kelompok yaitu :

- Menganggur (*unemployed*) yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*).
- Setengah menganggur (*under employed*) yaitu mereka yang bekerja tetapi belum

---

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik, bps.go.id

dimanfaatkan secara penuh atau mereka yang bekerja dengan jam kerja yang kurang dari 35 jam per minggu.

- Bekerja penuh (*employed*) yaitu mereka yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

Masalah pengangguran dapat menimbulkan dampak buruk atau menimbulkan biaya sosial, yaitu (1) terganggunya stabilitas perekonomian karena pengangguran menimbulkan melemahnya permintaan agregat dan penawaran agregat, dan (2) terganggunya stabilitas sosial politik karena pengangguran dapat meningkatkan ketimpangan dan kecemburuan sosial tindakan kriminalitas baik berupa kejahatan pencurian, perampokan, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan berbagai kegiatan ekonomi ilegal lainnya, bahkan dapat menimbulkan tidak lancarnya sistem demokrasi karena *money politic* lebih dominan.

## 2.4. Belanja Pemerintah

### 2.4.1. Definisi Belanja Pemerintah

Pemerintah adalah pihak yang mewakili dan menjalankan tugas dan fungsi Negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat suatu wilayah atau Negara.

Suparmokodan Furtasan menjelaskan bahwa :

**Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, karena kegiatan pemerintah dibiayai dengan pengeluaran pemerintah. Jadi semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tetapi hendaknya disadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Penghasilan Nasional Bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat besar kasar terhadap kegiatan atau peranan pemerintah dalam suatu perekonomian.**<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>M. Suparmoko dan H. Furtasan Ali Yusuf, **Manajemen Keuangan Sektor Publik**, Universitas Bina Bangsa: In Media, 2017, hal.19

Di Negara manapun, selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintahan yang dalam peraturan ekonomi negerinya berperan semata-mata hanya sebagai “wasit” atau “polisi”, yang hanya berfungsi membuat undang-undang dan peraturan, untuk kemudian menjadi peleraai jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil untuk dicegah. Tidak ada satu pun perekonomian, termasuk negara kapitalis atau negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya. Dibeberapa negara pemerintahnya terlibat erat dalam perekonomian, sementara di negara-negara lain campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas.

#### **2.4.2. Komponen Belanja Pemerintah**

Ada beberapa komponen belanja pemerintah, yaitu :

1. Belanja langsung dapat dikelompokkan menjadi, belanja pegawai yang mengandung pengertian belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk upah, lembur dan pengeluaran lain pegawai. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan berbagai program. Belanja barang dan jasa juga merupakan belanja langsung belanja ini digunakan untuk pembelian/pengadaan barang nilai manfaatnya kurang dari setahun, atau untuk pengeluaran pemakaian jasa untuk melaksanakan berbagai program. Belanja lain yang termasuk belanja langsung yaitu barang modal yang merupakan belanja untuk meningkatkan modal yang dapat menambah aset tetap bagi suatu negara dengan melakukan pemeliharaan untuk mempertahankan inventaris atau infrastruktur yang dimiliki suatu negara sehingga memberikan manfaat serta dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas aset negara.

2. Belanja tidak langsung, meliputi :

- belanja pegawai, yaitu belanja dalam bentuk kompensasi yang diberikan kepada pegawai berupa gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai undang-undang,
- belanja bunga yang merupakan belanja yang digunakan untuk pembayaran bunga utang berdasarkan kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian jangka pendek, menengah, dan panjang,
- belanja subsidi, belanja yang dianggarkan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar hasil produksi yang dilakukan perusahaan tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat banyak,
- belanja hibah, belanja yang diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa,
- belanja bantuan sosial, belanja yang dianggarkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk jaminan sosial, perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan,
- belanja bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan,
- bantuang keuangan, belanja yang diberikan kepada daerah untuk pemerataan dan bantuan keuangan akibat kurangnya keuangan daerah,
- belanja tidak terduga, belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga

## **2.5. Investasi**

### **2.5.1. Definisi Investasi**

Segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menciptakan dan menambah nilai kegunaan hidup adalah investasi, jadi investasi bukan hanya dalam bentuk fisik,

melainkan juga non fisik terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sadono Sukirno, menjelaskan bahwa :

**Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran/pengeluaran yang berikut:**

- 1. pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.**
- 2. pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.**
- 3. penambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.<sup>14</sup>**

### **2.5.2. Jenis-jenis Investasi**

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara ataupun swastanasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut, dapat secara perorangan dan atau merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN adalah penggunaan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Penanaman Modal

---

<sup>14</sup>Sadono, Sukirno, **Op.Cit.** hal.121

dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri Langsung (Domestic Direct Investment atau DDI), yaitu penanaman modal oleh pemiliknya sendiri.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri Tidak Langsung (Domestic Indirect Investment atau DDI), yaitu melalui pembelian obligasi-obligasi, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Pengertian modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. PMA hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 dan yang digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Gregory Mankiw dalam Nelly menjelaskan bahwa :

**Ada tiga jenis pengeluaran investasi, Investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Investasi residensial (*residential investment*) mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang membeli tuan tanah untuk disewakan, Investasi persediaan (*inventory investment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan digudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi.<sup>15</sup>**

Untuk membangun itu seyogianya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

---

<sup>15</sup>Nelly Nofrianti Panjaitan, **Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi, Investasi dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara Tahun 2006-2017**.hal.30-31.

Dalam ekonomi makro, investasi jenis ini dikenal dengan investasi otomatis (*autonomous investment*), yaitu investasi yang terjadi secara otomatis sesuai perkembangan kebutuhan hidup seseorang, sekelompok orang atau suatu organisasi, bahkan negara.

a) Investasi untuk memenuhi keinginan.

Seiring dengan perkembangan zaman, keinginan manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan makin banyak, misalnya keinginan untuk rekreasi, kemudahan dalam berbagai aktivitas kehidupan, dan sebagainya. Dorongan ini menghasilkan tuntutan baru selain pemenuhan kebutuhan minimal syarat kehidupan, yang disebut dengan keinginan, yang pemenuhannya juga memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan investasi.

Dalam ekonomi makro, jenis investasi yang terjadi karena dorongan keinginan dikenal dengan istilah investasi yang disengaja (*induced investment*), yaitu investasi yang sengaja diinginkan oleh seseorang, organisasi karena keinginan masa depan, atau karena ada harapan yang menjajikan.

b) Investasi publik atau Investasi oleh Negara.

Investasi ini adalah investasi yang dilakukan oleh negara, atau sumber daya investasi tersebut berasal dari milik atau kekayaan negara. dalam pelaksanaannya, investasi oleh negara ini dilakukan oleh atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi dengan karakteristik seperti ini bersifat nirlaba atau non-profit, misalnya pembangunan jalan, dan jembatan, irigasi sekolah, taman, pasar, rumah sakit, pelabuhan, bandara, dana sarana prasarana publik lainnya.

c) Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan istilah investasi *profit motive*. investasi seperti ini dapat dilakukan oleh :

- Usaha mikro atau rumah tangga,
- Usaha Kecil Menengah (UKM),
- Usaha besar seperti PMDN maupun PMA, dan sebagainya

### **2.5.3. Manfaat Investasi**

Pada dasarnya, hampir semua bentuk investasi bermanfaat bagi kepentingan publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Contohnya adalah investasi dibidang pendidikan dan sumber daya manusia, investasi dibidang kesehatan, investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan sebagainya), dan investasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.5.4. Proses Investasi**

Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan investasi pada efek-efek yang bisa dipasarkan, dan kapan dilakukan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut :

Menentukan tujuan investasi Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini, yaitu :

- a) tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*),
- b) tingkat resiko (*rate of risk*),
- c) ketersediaan sejumlah dana yang akan diinvestasikan.

Apabila dana cukup tersedia, maka investor menginginkan penghasilan yang maksimal dengan risiko tertentu. Umumnya hubungan antara *risk* dan *return* bersifat linear, artinya

semakin besar *rate of risk*, maka semakin besar pula *expected rate of return*.

## 2.6. Hubungan Variabel-variabel Penelitian

### 2.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Menurut Case, Karl E. menjelaskan bahwa:

**Ada yang percaya pertumbuhan merupakan tujuan dasar masyarakat, karena pertumbuhan mengangkat orang keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Yang lain mengatakan pertumbuhan ekonomi mengikis nilai-nilai tradisional dan menyebabkan eksploitasi, kerusakan lingkungan, dan korupsi<sup>16</sup>.**

### 2.6.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*).

Menurut Todarodalam Seri Jefri Adil Waruwu mengatakan bahwa :

**Ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang merajalela, dan ketidak merataan distribusi pendapatan. Sebagian besar didalamnya adalah mereka yang bekerja *part time*. Mereka yang bekerja secara tetap di sektor pemerintah dan swasta termasuk dalam kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Hal ini tidak bisa diartikan bahwa setiap orang yang tidak bekerja adalah miskin atau mereka yang bekerja "*full time*" relative berpenghasilan baik. Terdapat kemungkinan adanya penganggur yang**

---

<sup>16</sup>Karl E. Case, &Ray C. Fair. **Op.Cithal**. 323

**mengganggu secara sukarela serta kualifikasi kecakapan. Mereka menolak jenis pekerjaan yang tidak disukai dan hal ini mereka bisa menolak karena memiliki cukup sumber keuangan dari keluarga, teman atau pinjaman lainnya.<sup>17</sup>**

### **2.6.3 Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Belanja pemerintah dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin dengan dampak penurunan angka kemiskinan di karenakan setiap ada pembelanjaan pemerintah dalam berbagai sektor akan berdampak negatif terhadap kemiskinan.

Menurut Dumairy,

**Dalam neraca anggaran pendapatan dan belanja negara, pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga pemerintah, serta sejumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.<sup>18</sup>**

Untuk mewujudkan hal diatas, diperlukan kemampuan Negara (pemerintah) untuk mengadakan berbagai sarana dan fasilitas publik dan jasa pelayanan kebutuhan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Negara dan pemerintahan seperti itu, diperlukan anggaran yang memadai untuk membiayai berbagai kebutuhan pencapaian tujuan bernegara.

### **2.6.4 Pengaruh Investasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Pada dasarnya, hampir semua bentuk investasi bermanfaat bagi kepentingan publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Contohnya adalah investasi dibidang pendidikan dan

---

<sup>17</sup>Seri Jefri Adil Waruwu, **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014**, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2016, hal. 63 (skripsi diterbitkan)

<sup>18</sup>Dumairy. **Perekonomian Indonesia**. Jakarta: Erlangga. 1996. hal. 157

sumber daya manusia, investasi dibidang kesehatan, investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan sebagainya), dan investasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kemiskinan adalah situasi dimana pendapatan tahunan individu disuatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak dikawasan tersebut. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Pertumbuhan investasi dapat mengembangkan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang sangat bernilai dari produksi barang-barang dan jasa-jasa sebelumnya. Peningkatan investasi juga dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja.

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini akan memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Drs. Jusmer Sihotang, M.Si. Dengan menggunakan penelitian data sekunder, dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatra Utara. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka berhubungan positif, sementara IPM dan tingkat inflasi berhubungan negatif dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatra Utara.

**Tanda negatif dari koefisien regresi variabel IPM dan tanda positif dari koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan harapan teoritis. Namun tanda positif dari koefisien regresi variabel tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tanda negatif dari koefisien regresi variabel tingkat inflasi tidak sesuai dengan harapan teoritis<sup>19</sup>.**

---

<sup>19</sup> Sihotang, J. **Op.Cit.** hal. 46

2. Penelitian yang dilakukan oleh Seri Jefry Adil Waruwu dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995 – 2014. Penelitian ini menggunakan metode, OLS Data Panel.

**Hasil analisis mengenai pengaruh PMA, PMDN, Angkatan Kerja dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Sedangkan penambahan variabel dummy krisis menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.**<sup>20</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Helmi Winda Wati, dengan judul Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan metode, OLS Data Panel. “Variabel belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (pada 33 Propinsi)”<sup>21</sup>.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Deddy Rustiono dengan judul Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah Penelitian ini menggunakan metode, OLS. Hasil penelitian ini adalah :

**Hasil analisis mengenai pengaruh PMA, PMDN, Angkatan Kerja dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Sedangkan penambahan variabel dummy krisis menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.**<sup>22</sup>

## 2.8. Kerangka Pemikiran

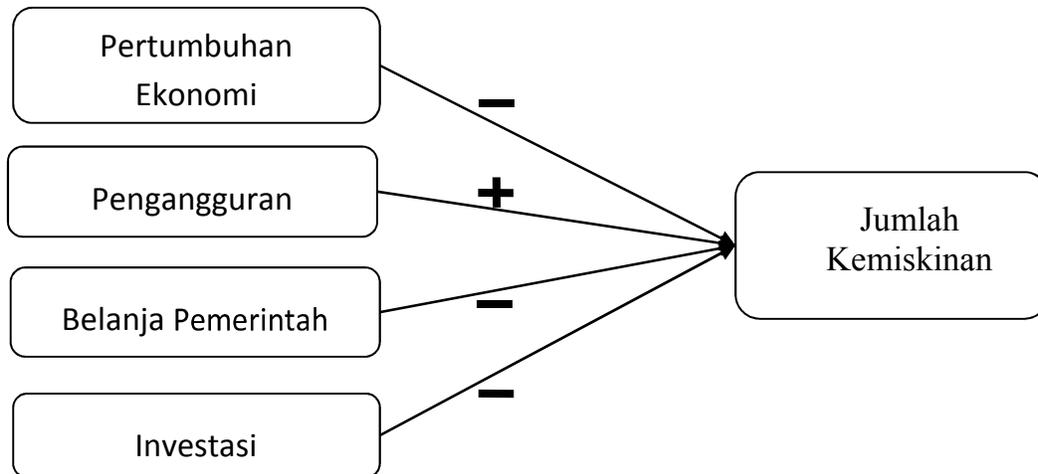
---

<sup>20</sup>Seri Jefry Adil Waruwu. *Op.Cit.*hal. 144

<sup>21</sup>Helmi Winda Wati. *Analisis Pengaruh belanja modal daerah, investasi, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Indoensia.*2015.*Jurnal.* <https://core.ac.uk/download/files/379/11716719.pdf> di akses tanggal 15 Februari 2016.hal. 87

<sup>22</sup>Deddy Rustiono. *Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi jawa tengah.*2008*Tesis.*hal. lix

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Investasi yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin). Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini, adalah:



**Gambar 2.1.** Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi indikator yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap tingkat penduduk miskin, maka diharapkan pendapatan nasional dapat menyebar secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengangguran pada suatu daerah dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, tingkat pengangguran akan berdampak positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Belanja pemerintah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Dengan program yang tepat sasaran atau pengalokasian dana yang termasuk pengeluaran pemerintah maka kemiskinan semakin berkurang di Indonesia.

Investasi yang banyak di berbagai daerah di Indonesia, maka semakin banyak lowongan pekerjaan yang terbuka dan masyarakat semakin produktif, sehingga akan berpengaruh negatif pada jumlah kemiskinan di Indonesia.

## **2.9. Hipotesis Penelitian**

- a) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.
- b) Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.
- c) Belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.
- d) Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari (Badan Pusat Statistik dan *World Bank*). Data yang digunakan meliputi data kemiskinan Indonesia atau *poverty*, data pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka di Indonesia, data belanja pemerintah dan data

investasi Indonesia. Obyek penelitian ini adalah kemiskinan dimana peneliti bermaksud untuk menganalisis pengaruh-pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah, dan investasi terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia dalam periode tahunan yaitu sejak kurun tahun dua ribu lima sampai tahun dua ribu tujuh belas.

### **3.2. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), DataBank Indonesia (BI), data BAPPENAS dan Data BKPM yang dikumpulkan adalah meliputi data penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, data pengangguran, belanja pemerintah dan data investasi. Jangka waktu data yang digunakan adalah tahun 2000 sampai dengan 2018.

Jenis data adalah data *time series* (runtun waktu). Data *time series* adalah data yang menggambarkan suatu perkembangan dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatra Utara, penelitian kepustakaan, browsing internet, dan berbagai laporan-laporan yang telah dipublikasikan oleh instansi yang relevan dengan penelitian ini.

### **3.3. Model Analisis**

#### **3.3.1 Model Kuantitatif**

Metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah, dan investasi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018. Menggunakan metode analisis kuantitatif.

Analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang akan menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi linier berganda. Adapun

persamaan regresi linier berganda tersebut, adalah sebagai berikut:

### 3.3.1.1 Pengujian Hipotesis dan Uji Keباikan Suai

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda. Model persamaannya regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + \hat{\beta}_4 X_4 + \varepsilon_i; i = 1, 2, 3, \dots, n,$$

dimana:

$Y$  = jumlah penduduk miskin (juta jiwa).

$\hat{\beta}_0$  = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3, \hat{\beta}_4$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pertumbuhan ekonomi (%)

$X_2$  = Pengangguran terbuka (%)

$X_3$  = Belanja pemerintah (milyar rupiah)

$X_4$  = Investasi (PMA dan PMDN) (milyar rupiah)

$\varepsilon_i$  = Galat (Error term)

### 3.3.1.2 Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (kemiskinan), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata  $\alpha = 5\%$ .

#### a) Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ )

$H_0: \beta_1 = 0$  artinya, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia.

$H_1: \beta_1 < 0$  artinya, ada pengaruh negatif dan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi

terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$$

$\hat{\beta}_1$  : koefisien regresi

$\beta_1$  : parameter

$S(\hat{\beta}_1)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah Kemiskinan di Indonesia. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan jumlah Kemiskinan di Indonesia.

#### **b) Pengangguran ( $X_2$ )**

$H_0: \beta_2 = 0$  artinya, Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia

$H_1: \beta_2 > 0$  artinya, Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$$

$\hat{\beta}_2$  : koefisien regresi

$\beta_2$  : parameter

$S(\hat{\beta}_2)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Kemudian apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya Pengangguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.

### c. Belanja Pemerintah ( $X_3$ )

$H_0: \beta_3 = 0$  artinya, Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.

$H_1: \beta_3 < 0$  artinya, Belanja Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah Kemiskinan di Indonesia.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$$

$\hat{\beta}_3$  : koefisien regresi

$\beta_3$  : parameter

$S(\hat{\beta}_3)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Belanja Pemerintah parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya Belanja Pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah Kemiskinan

diIndonesia.

#### **d. Investasi (X4)**

$H_0: \beta_4 = 0$  artinya, Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan diIndonesia.

$H_1: \beta_4 < 0$  artinya, Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlahKemiskinan diIndonesia.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_4 - \beta_4}{S(\hat{\beta}_4)}$$

$\hat{\beta}_4$  : koefisien regresi

$\beta_4$  : parameter

$S(\hat{\beta}_4)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Investasi parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlahkemiskinan diIndonesia. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya Investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlahKemiskinan diIndonesia.

#### **3.3.1.3 Uji Secara Simultan ( Uji F)**

Uji “F” digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak. Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

a. Membuat hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$  berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

$H_1: \beta_i$  tidak semua nol,  $i = 1, 2, 3, 4$ , berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan  $\alpha$  dan df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator* (n-k).

Rumus untuk mencari  $F_{hitung}$  adalah : 
$$\frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  di tolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

#### 3.3.1.4 Uji Kebaikan Suai : Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel takbebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi  $R^2$  untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel takbebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$ ;  $R^2 \rightarrow 1$  artinya “semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu

menjelaskan data aktualnya.”<sup>23</sup>

### 3.4. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

#### 3.4.1 Multikolinieritas

Menurut Agus Widarjono ”multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda”<sup>24</sup>. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai  $VIF \leq 10$  dan  $Tol \geq 0.1$  maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya  $VIF \geq 10$  dan  $Tol \leq 0.1$  maka dianggap ada pelanggaran multikolinieritas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinieritas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks  $> 0,95$  maka kolinieritasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks  $< 0,95$  maka kolinieritas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan menggunakan cara regresi

---

<sup>23</sup> Agus Widarjono, **Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya**, Edisi 4, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2013, hal.26

<sup>24</sup> **Ibid**, hal.101

sekuensial antara sesama variabel bebas. Nilai  $R^2$  sekuensial dibandingkan dengan nilai  $R^2$  pada regresi model utama. Jika  $R^2$  sekuensial lebih besar dari pada nilai  $R^2$  pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

### 3.4.2 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu  $t$  dengan galat pada periode waktu  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji: Durbin Watson (uji  $D - W$ ). "Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen."<sup>25</sup>

Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis  $d_l$  dan  $d_u$  dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai  $\alpha$ . Secara umum bisa diambil patokan:

- Angka  $D - W$  di bawah  $-2$  berarti ada autokorelasi positif.
- Angka  $D - W$  di atas  $+2$  berarti ada autokorelasi negatif.
- Angka  $D - W$  di antara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi.

### 3.4.3 Uji Run

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan

---

<sup>25</sup> Imam Gozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hal.108

dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. “Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).”<sup>26</sup> Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Galat (res\_1) acak (random)

$H_1$  : Galat (res\_1) tidak acak

### 3.4.3 Normalitas

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \varepsilon_i$$

1.  $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$  Apakah galat (distribusi error) menyebar normal atau tidak
2.  $\varepsilon_i$  tidak terjadi autokorelasi.

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. “Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.”<sup>27</sup> untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

#### 1. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal.

---

<sup>26</sup> Ibid, hal. 116

<sup>27</sup> Ibid, hal. 154

Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

## 2. Analisis Statistik

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjuluran (skewness) dan keruncingan (kurtosis) dari sebaran galat. Menurut Ghozali nilai Z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut :

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{\frac{6}{n}}} \text{ dan } Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{\frac{24}{n}}}, \text{ dimana } n \text{ adalah ukuran sampel.}$$

Menurut Ghozali untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Data galat (residu) menyebar normal

$H_1$  : Data galat tidak menyebar normal.

### 3.5. Definisi Oprasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini definisi oprasional yang di gunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Jumlah Penduduk Miskin ( Y )

Jumlah Penduduk Miskin adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jumlah kemiskinan, yaitu jumlah penduduk di Indonesia tahun 2000-2018 satuan data adalah juta orang

## **2. Pertumbuhan Ekonomi (X1)**

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Data yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2018. Pertumbuhan ekonomi di hitung dalam satuan persen.

## **3. Pengangguran (X2)**

Pengangguran Terbuka adalah orang yang termasuk dalam kelompok usia angkatan kerja mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkannya. Data yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2000-2018. Pengangguran terbuka di hitung dalam satuan persen.

## **4. Belanja Pemerintah (X3)**

Belanja Pemerintah adalah belanja total yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja pemerintah pusat, belanja daerah (transfer ke daerah), dan belanja lain-lain. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah belanja pemerintah di Indonesia tahun 2000-2018. Di hitung dalam milyar rupiah.

## **5. Investasi (X4)**

Dalam skripsi ini data investasi yang di gunakan adalah data PMA dan PMDN dengan jumlah total investasi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data investasi di Indonesia tahun 2000-2018 dalam satuan milyar rupiah.

